

KONFLIK SUMBER DAYA ALAM ANTARA MASYARAKAT LOKAL DAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT: PERSPEKTIF EKONOMI DAN EKOLOGI POLITIK DI TELUK SINGKAMA KUTAI TIMUR

Jamila¹, Herma Puspa Sari², Alya Rafeyfa Asyla³, Siti Latifaturrahmah⁴

STAI Sangatta, Indonesia

Email : Ogiebarru87@gmail.com, hermapuspasari@gmail.com, alyarefa98@gmail.com, sitilatifaturrohmah4@gmail.com

Article Info

Received	Accepted	Published
29 Juni 2026	30 Juni 2026	30 Juni 2026

Keywords:

Natural Resource Conflict
Local Communities
Oil Palm Plantation
Economic Perspective
Political Ecology

ABSTRACT

This study aims to analyze the form of natural resource conflict between local communities and oil palm plantation companies and their efforts to resolve them in Singkama Bay, South Sangatta District, East Kutai Regency, using an economic and political ecology perspective. This research uses a descriptive qualitative approach. Data were obtained through interviews, observations, and documentation involving local communities, community leaders, company representatives, and the government. Data were analyzed using Miles and Huberman's interactive model, then interpreted through a political ecology perspective by paying attention to economic interests, resource access, and power relations between actors. The results of the study showed that conflicts include three interrelated aspects, namely land tenure, access to natural resources, and environmental impacts. Conflicts are strengthened by differences in economic interests as well as inequality of access and bargaining positions between communities and companies. Efforts to resolve through deliberation, dialogue, mediation, government involvement, and corporate social responsibility programs are relatively effective in reducing tensions, but have not fully resolved substantive issues, especially related to land rights, compensation, and equitable access to resources. Conflict resolution requires more participatory, transparent, and equitable resource governance that considers economic, social, and environmental interests in a balanced manner.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk konflik sumber daya alam antara masyarakat lokal dan perusahaan perkebunan kelapa sawit serta upaya penyelesaiannya di Teluk Singkama, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, dengan menggunakan perspektif ekonomi dan ekologi politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan masyarakat lokal, tokoh masyarakat, perwakilan perusahaan, dan pemerintah. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, kemudian diinterpretasikan melalui perspektif ekologi politik dengan memperhatikan kepentingan ekonomi, akses sumber daya, dan relasi kekuasaan antaraktor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik meliputi tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu penguasaan lahan, akses terhadap sumber daya alam, dan dampak lingkungan. Konflik

Kata Kunci:

Konflik Sumber Daya Alam
Masyarakat Lokal
Perkebunan Kelapa Sawit
Perspektif Ekonomi
Ekologi Politik

diperkuat oleh perbedaan kepentingan ekonomi serta ketimpangan akses dan posisi tawar antara masyarakat dan perusahaan. Upaya penyelesaian melalui musyawarah, dialog, mediasi, keterlibatan pemerintah, dan program tanggung jawab sosial perusahaan relatif efektif dalam meredam ketegangan, tetapi belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan substantif, terutama terkait hak atas lahan, kompensasi, dan keadilan akses terhadap sumber daya. Penyelesaian konflik memerlukan tata kelola sumber daya yang lebih partisipatif, transparan, dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang.

Copyright and License:

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



1. PENDAHULUAN

Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki peran penting dalam pembangunan wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam. Keberadaan industri perkebunan kelapa sawit dapat memberikan kontribusi melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah.¹ Namun, ekspansi perkebunan kelapa sawit tidak selalu menghasilkan manfaat yang terdistribusi secara merata. Penguasaan dan pemanfaatan sumber daya lahan dalam kegiatan perkebunan dapat memunculkan persoalan sosial dan lingkungan, terutama ketika kepentingan perusahaan berhadapan dengan kepentingan masyarakat lokal dalam mengakses dan memanfaatkan sumber daya alam.²

Konflik antara masyarakat lokal dan perusahaan perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu bentuk persoalan yang sering muncul dalam pengelolaan sumber daya alam.³ Konflik dapat berawal dari perbedaan klaim atas penguasaan lahan dan keterbatasan akses masyarakat terhadap sumber daya.⁴ Dalam kondisi tertentu, konflik dapat berlangsung secara terbuka melalui penyampaian protes, demonstrasi, maupun sengketa hukum, tetapi dapat pula berlangsung secara tertutup dalam bentuk ketidakpuasan, rasa ketidakadilan, dan ketegangan sosial yang tidak selalu disampaikan secara langsung.⁵ Konflik sumber daya alam tidak semata-mata merupakan persoalan perbedaan kepentingan, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana sumber daya dikuasai, siapa yang memiliki akses terhadap

¹ Febri Yuliani, "Implementasi kebijakan penguatan kelembagaan perkebunan sawit rakyat pada lahan gambut," *Jurnal Kebijakan Publik* 10, no. 1 (2019): 33–40, <https://doi.org/10.31258/jkp.v10i1.7428>.

² Dinda Uswatun Hasanah dan Asih Mulyaningsih, "Persepsi Masyarakat Terhadap Dampak Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit: Tinjauan Literatur Tentang Aspek Ekonomi, Sosial, Dan Lingkungan," *Jurnal Ilmu Pertanian Tirtayasa* 8, no. 1 (2026): 25–38, <https://doi.org/10.33512/jipt.v8i1.40114>.

³ Ayuda Ramadhan, "Konflik Agraria Analisis Resolusi Konflik Agraria dan Sumber Daya Alam di Aceh," *Jurnal Transformasi Administrasi* 13, no. 01 (2023): 1–17, <https://doi.org/10.56196/jta.v13i01.247>.

⁴ Hendra Triawan Sudaryo Putra, Muhammad Ramli AT, dan Ridwan Syam, "Dinamika Konflik Agraria dan Ketimpangan Tata Kelola: Studi Kasus Sengketa Lahan di Desa Batu Mila," *Journal of Peace, Security and Democracy* 1, no. 2 (2025): 49–73, <https://doi.org/10.63280/jpsd.v1i2.45967>.

⁵ Tria Anggita Hafsari, "Di balik konflik sawit yang tak kunjung usai: Hak, kuasa, dan kehidupan masyarakat lokal," *Masyarakat Indonesia* 50, no. 2 (2024): 335–44, <https://doi.org/10.55981/jmi.2024.8897>.

sumber daya, serta bagaimana manfaat dan beban dari pemanfaatan sumber daya tersebut didistribusikan.

Persoalan tersebut relevan untuk dikaji di Teluk Singkama, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur. Berdasarkan hasil observasi, konflik antara masyarakat lokal dan perusahaan perkebunan kelapa sawit di wilayah tersebut berkaitan dengan penggunaan dan penguasaan lahan. Masyarakat menganggap sebagian lahan yang digunakan perusahaan merupakan tanah yang telah dikelola secara turun-temurun, sedangkan pihak perusahaan menyatakan bahwa lahan tersebut telah memiliki izin untuk dikelola sebagai kawasan perkebunan. Perbedaan klaim tersebut kemudian berkembang menjadi persoalan yang tidak hanya menyangkut lahan, tetapi juga akses masyarakat terhadap sumber daya alam dan dampak aktivitas perkebunan terhadap lingkungan sekitar. Temuan awal penelitian menunjukkan bahwa masyarakat juga menyampaikan keluhan mengenai berkurangnya ruang pemanfaatan lahan dan sumber daya serta perubahan kondisi lingkungan di sekitar wilayah perkebunan.

Konflik tersebut menunjukkan adanya perbedaan kepentingan antara masyarakat dan perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya alam. Perusahaan memiliki kepentingan terhadap keberlanjutan kegiatan produksi dan pengembangan usaha, sedangkan masyarakat memiliki kepentingan terhadap keberlangsungan sumber penghidupan dan akses terhadap lahan yang selama ini dimanfaatkan. Perbedaan kepentingan tersebut menjadi semakin kompleks ketika terdapat ketimpangan dalam akses terhadap sumber daya dan kekuasaan. Dalam penelitian ini, perusahaan memiliki akses yang lebih besar terhadap modal, legalitas, dan sumber daya ekonomi, sementara masyarakat berada pada posisi tawar yang relatif lebih lemah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa konflik di Teluk Singkama tidak dapat dipahami hanya sebagai sengketa lahan, tetapi perlu dilihat sebagai persoalan relasi kekuasaan dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam.

Perspektif ekologi politik relevan digunakan untuk memahami persoalan tersebut karena pendekatan ini menempatkan persoalan lingkungan dalam hubungan yang erat dengan kekuasaan, kepentingan ekonomi, dan distribusi akses terhadap sumber daya alam. Dalam perspektif ini, perubahan lingkungan dan konflik sumber daya tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan relasi antaraktor yang memiliki kepentingan dan kapasitas berbeda dalam mengendalikan sumber daya.⁶ Pendekatan ekologi politik memungkinkan penelitian untuk melihat bagaimana kepentingan ekonomi perusahaan, kepentingan masyarakat, serta peran pemerintah berinteraksi dalam proses penguasaan sumber daya dan penyelesaian konflik.

Selain persoalan penyebab dan bentuk konflik, mekanisme penyelesaiannya menjadi aspek penting untuk dikaji. Konflik antara masyarakat dan perusahaan di Teluk Singkama telah diupayakan penyelesaiannya melalui musyawarah dan mediasi dengan melibatkan pemerintah desa maupun pemerintah daerah. Perusahaan juga melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*). Keterlibatan berbagai aktor tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tidak hanya berlangsung antara masyarakat dan perusahaan, tetapi juga melibatkan pemerintah dan aktor sosial lainnya. Namun, meredanya ketegangan belum tentu menunjukkan bahwa akar konflik telah terselesaikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejumlah persoalan, khususnya yang berkaitan dengan hak atas lahan dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya, masih memerlukan penyelesaian lebih lanjut.

⁶ Benjamin White, "Dibalik pertarungan sumber daya Indonesia: ekologi politik dan penerapannya pada studi dan perjuangan lingkungan hidup," *Tanah Air*, no. Oktober-Desember (2009): 3–9, https://repub.eur.nl/pub/18311/white_tanah_air_octdec09.pdf.

Sejumlah penelitian telah membahas konflik sumber daya alam dalam konteks perkebunan kelapa sawit. Hafsari melalui kajiannya tentang konflik masyarakat dan perusahaan sawit di Indonesia menunjukkan bahwa ekspansi perkebunan dapat menempatkan masyarakat lokal pada posisi yang lemah dalam mempertahankan hak atas tanah.⁷ Sinambela et al. tentang perluasan perkebunan kelapa sawit di Papua menunjukkan bahwa ekspansi sawit tidak hanya berdampak pada lingkungan melalui deforestasi, kerusakan ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, gangguan tata air, dan peningkatan emisi karbon, tetapi juga memicu konflik agraria berupa sengketa lahan dan persoalan hak ulayat masyarakat adat.⁸ Sedangkan Lestari dan Maryanah dalam penelitian mengenai manajemen konflik agraria di Desa Pagar Batu menemukan bahwa dinamika konflik melibatkan beberapa gaya penyelesaian, yaitu kompetisi, kolaborasi, penghindaran, dan akomodasi. Di antara pendekatan tersebut, kolaborasi dinilai paling relevan karena mendorong dialog terbuka dan memungkinkan terbentuknya solusi yang mendukung pembangunan berkelanjutan.⁹

Namun, penelitian terdahulu cenderung membahas konflik perkebunan kelapa sawit dari aspek hak atas tanah, dampak ekologis, atau strategi manajemen konflik secara terpisah. Kajian yang mengintegrasikan ketiga aspek tersebut, yakni bentuk konflik, ketimpangan akses dan relasi kekuasaan dalam penguasaan sumber daya, serta efektivitas mekanisme penyelesaian konflik masih relatif terbatas, khususnya dalam konteks hubungan masyarakat lokal dan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Teluk Singkama. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya analisis yang tidak hanya mengidentifikasi bentuk dan penyebab konflik, tetapi juga menelaah bagaimana relasi kekuasaan memengaruhi proses penyelesaian serta sejauh mana mekanisme tersebut mampu menjawab persoalan mendasar yang dihadapi para pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan faktor yang melatarbelakangi konflik sumber daya alam antara masyarakat lokal dan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Teluk Singkama serta menganalisis upaya penyelesaian konflik dan efektivitasnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memahami konflik sumber daya alam melalui perspektif ekologi politik sekaligus memberikan masukan bagi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam membangun mekanisme pengelolaan sumber daya alam yang lebih adil dan berkelanjutan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.¹⁰ Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai konflik sumber daya alam antara masyarakat lokal dan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Teluk Singkama, khususnya berkaitan dengan bentuk konflik, kepentingan para aktor, relasi kekuasaan, serta upaya penyelesaian konflik. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti

⁷ Hafsari, "Di balik konflik sawit yang tak kunjung usai: Hak, kuasa, dan kehidupan masyarakat lokal."

⁸ Amsal Sinambela et al., "Perluasan Lahan Sawit Di Papua Untuk Swesembada Energi: Tinjauan Kritis Atas Daya Dukung Lingkungan Dan Konflik Agraria," *E-journal Field of Economics, Business and Entrepreneurship (EFEBE)* 4, no. 2 (2026): 823–35, <https://doi.org/10.23960/efebe.v4i2.348>.

⁹ Suci Indah Lestari dan Tabah Maryanah, "ANALISIS MANAJEMEN KONFLIK AGRARIA DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI DESA PAGAR BATU," *Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK)* 4 (2025): 1296–1306, <https://doi.org/10.36441/snpk.vol4.2025.462>.

¹⁰ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. oleh Patta Rapanna, 1 ed. (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021).

memahami fenomena berdasarkan pengalaman, pandangan, dan interpretasi pihak-pihak yang terlibat dalam konteks alamiahnya.

Penelitian dilaksanakan di wilayah Teluk Singkama, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur. Lokasi penelitian karena terdapat konflik yang berkaitan dengan penguasaan dan pemanfaatan lahan antara masyarakat lokal dan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Selain itu, masyarakat di wilayah penelitian memiliki keterkaitan sosial dan ekonomi dengan sumber daya alam di sekitarnya sehingga perubahan pemanfaatan lahan menjadi konteks penting dalam memahami dinamika konflik.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder.¹¹ Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan konflik, meliputi masyarakat lokal, tokoh masyarakat, perwakilan perusahaan, dan aparat pemerintah. Data primer digunakan untuk memperoleh informasi mengenai latar belakang konflik, bentuk konflik, kepentingan para pihak, proses penyelesaian, serta persepsi mengenai efektivitas penyelesaian konflik. Data sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, dan dokumen yang relevan dengan konflik sumber daya alam, perkebunan kelapa sawit, ekologi politik, dan resolusi konflik.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.¹² Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang disusun berdasarkan fokus penelitian. Teknik ini memberikan ruang bagi peneliti untuk mengembangkan pertanyaan berdasarkan informasi yang disampaikan informan sehingga pengalaman, persepsi, dan pandangan masing-masing pihak dapat digali secara lebih mendalam. Wawancara dilakukan secara langsung di lokasi penelitian dan didukung dengan pencatatan hasil wawancara serta perekaman apabila memperoleh persetujuan dari informan.

Observasi dilakukan secara langsung dan non-partisipatif untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan di wilayah penelitian. Observasi digunakan sebagai data pendukung untuk memahami konteks konflik serta mencermati kondisi lapangan yang berkaitan dengan informasi yang diperoleh melalui wawancara. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian melalui foto kondisi lapangan, aktivitas masyarakat, catatan lapangan, serta dokumen lain yang relevan dengan fokus penelitian.

Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang dilakukan secara berkelanjutan selama proses penelitian.¹³ Analisis dimulai dengan reduksi data melalui proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan pengelompokan data berdasarkan fokus penelitian. Data kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif dan pengelompokan tema untuk memudahkan identifikasi hubungan antartemuan. Tahap selanjutnya adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Kesimpulan tidak hanya ditarik pada tahap akhir penelitian, tetapi diverifikasi secara terus-menerus dengan membandingkan temuan yang diperoleh selama proses pengumpulan dan analisis data.

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai kelompok informan, yaitu masyarakat lokal, tokoh masyarakat, pihak perusahaan, dan pemerintah. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data

¹¹ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. oleh Meyniar Albina, 1 ed. (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), [http://repository.uinsu.ac.id/19091/1/buku metode penelitian kualitatif.Abdul Fattah.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/19091/1/buku%20metode%20penelitian%20kualitatif.Abdul%20Fattah.pdf).

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011).

¹³ M B Miles, A M Huberman, dan J Saldana, *Qualitative Data Analysis* (Arizona: SAGE Publications, 2014), <https://books.google.co.id/books?id=3CNrUbTu6CsC>.

hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses triangulasi digunakan untuk menguji konsistensi informasi dan meningkatkan kredibilitas temuan penelitian.

Analisis data selanjutnya diinterpretasikan menggunakan perspektif ekologi politik dengan memperhatikan hubungan antara kepentingan ekonomi, akses terhadap sumber daya, relasi kekuasaan, serta peran masing-masing aktor dalam konflik dan proses penyelesaiannya. Dengan pendekatan tersebut, penelitian tidak hanya mendeskripsikan bentuk konflik, tetapi juga menganalisis faktor yang melatarbelakanginya serta sejauh mana mekanisme penyelesaian yang dilakukan mampu merespons persoalan yang menjadi akar konflik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Konflik Sumber Daya Alam Antara Masyarakat Lokal dan Perusahaan Perkebunan Sawit di Teluk Singkama

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dan pihak terkait di Teluk Singkama, konflik sumber daya alam antara masyarakat lokal dan perusahaan perkebunan kelapa sawit terutama berawal dari persoalan penggunaan dan penguasaan lahan. Masyarakat menganggap sebagian lahan yang digunakan perusahaan merupakan tanah yang telah dikelola secara turun-temurun dan menjadi bagian dari ruang hidup masyarakat. Sementara itu, perusahaan menyatakan bahwa lahan tersebut telah memiliki dasar perizinan untuk dikelola sebagai kawasan perkebunan kelapa sawit. Perbedaan klaim tersebut menjadi salah satu sumber utama munculnya konflik karena kedua pihak memiliki dasar legitimasi yang berbeda dalam memandang penguasaan dan pemanfaatan lahan.

Bagi masyarakat, hubungan dengan lahan tidak hanya berkaitan dengan aspek kepemilikan secara administratif, tetapi juga dengan sejarah penguasaan, pemanfaatan secara turun-temurun, dan ketergantungan terhadap lahan sebagai sumber penghidupan. Sebaliknya, perusahaan memandang lahan sebagai sumber daya ekonomi yang pemanfaatannya didasarkan pada legalitas dan kepentingan keberlanjutan kegiatan perkebunan. Perbedaan perspektif tersebut menunjukkan bahwa konflik di Teluk Singkama bukan semata-mata merupakan persoalan administratif mengenai status lahan, tetapi juga merupakan pertentangan kepentingan mengenai hak dan kewenangan dalam menentukan pemanfaatan sumber daya alam.

Konflik penguasaan lahan selanjutnya berkembang menjadi persoalan akses masyarakat terhadap sumber daya alam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat merasakan berkurangnya ruang yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan pemanfaatan hasil alam. Keberadaan dan aktivitas perkebunan menyebabkan masyarakat mengalami perubahan dalam mengakses kawasan yang sebelumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan penggunaan lahan memiliki konsekuensi terhadap pola penghidupan masyarakat, khususnya bagi kelompok yang memiliki ketergantungan terhadap sumber daya alam di sekitar wilayah tempat tinggalnya.

Selain persoalan lahan dan akses sumber daya, masyarakat juga menyampaikan keluhan mengenai perubahan kondisi lingkungan di sekitar wilayah perkebunan, seperti kerusakan jalan dan berkurangnya hasil alam. Keluhan tersebut memperlihatkan bahwa konflik tidak hanya muncul karena perbedaan klaim atas sumber daya, tetapi juga karena adanya persepsi mengenai dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas perkebunan.

Temuan tersebut dapat dijelaskan melalui perspektif konflik yang menempatkan perbedaan kepentingan dan perebutan sumber daya sebagai salah satu faktor munculnya konflik sosial. Wahyudi menjelaskan bahwa konflik sosial dapat muncul akibat adanya

perbedaan kepentingan dan perebutan kekuasaan atau sumber daya antara kelompok dalam masyarakat.¹⁴ Dalam konteks Teluk Singkama, perusahaan memiliki kepentingan untuk mempertahankan kegiatan produksi dan pemanfaatan lahan sebagai basis kegiatan ekonomi, sedangkan masyarakat memiliki kepentingan untuk mempertahankan akses terhadap lahan dan sumber daya yang menjadi bagian dari kehidupan mereka. Pertemuan dua kepentingan tersebut pada ruang sumber daya yang sama menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya konflik.

Jika dianalisis melalui perspektif ekologi politik, konflik tersebut memperlihatkan adanya persoalan mengenai distribusi akses dan kekuasaan dalam penguasaan sumber daya alam. Sanusi menjelaskan bahwa politik ekologi menempatkan persoalan lingkungan dalam hubungan yang erat dengan kekuasaan, kepentingan, serta penguasaan sumber daya.¹⁵ Dalam kasus Teluk Singkama, perusahaan memiliki akses yang lebih besar terhadap modal, legalitas, dan sumber daya ekonomi dibandingkan masyarakat lokal. Kondisi tersebut menciptakan ketimpangan posisi dalam proses penguasaan dan pemanfaatan lahan.

Ketimpangan tersebut menjadi penting karena kemampuan setiap pihak dalam memperjuangkan kepentingannya tidak berada pada posisi yang sama. Perusahaan memiliki kapasitas ekonomi dan kelembagaan untuk menjalankan kegiatan perkebunan, sedangkan masyarakat lebih banyak mengandalkan sejarah penguasaan lahan, hubungan sosial, dan mekanisme penyampaian aspirasi untuk mempertahankan kepentingannya.

Perspektif ekologi politik juga membantu menjelaskan bahwa dampak perubahan pemanfaatan sumber daya tidak selalu dirasakan secara merata oleh seluruh aktor. Perusahaan memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan perkebunan, sementara masyarakat menghadapi perubahan akses terhadap lahan dan sumber daya serta dampak lingkungan yang mereka rasakan di sekitar wilayah perkebunan. Kondisi tersebut tidak berarti bahwa seluruh manfaat hanya diterima perusahaan atau seluruh dampak hanya ditanggung masyarakat, tetapi menunjukkan adanya persepsi mengenai ketidakseimbangan antara manfaat ekonomi dan konsekuensi sosial serta lingkungan yang menjadi bagian dari konflik.

Dalam pelaksanaannya, konflik di Teluk Singkama tidak berkembang menjadi kekerasan terbuka dalam skala besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat lebih banyak menyampaikan ketidakpuasan melalui protes, musyawarah, dan mediasi dengan melibatkan pemerintah desa maupun pihak perusahaan. Bentuk tersebut menunjukkan bahwa konflik berlangsung melalui mekanisme sosial dan kelembagaan yang memungkinkan para pihak menyampaikan kepentingannya tanpa harus menggunakan kekerasan.

Efriza dan Mendrofa menjelaskan bahwa konflik tidak selalu menghasilkan dampak negatif, tetapi dapat menjadi bagian dari dinamika hubungan sosial dan menjadi sarana bagi pihak-pihak yang berkonflik untuk menyampaikan kepentingan serta memperjelas hubungan antarkelompok.¹⁶ Dalam konteks Teluk Singkama, munculnya konflik justru mendorong terbentuknya ruang komunikasi antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah.

¹⁴ Andri Wahyudi, "Konflik, konsep teori dan permasalahan," *Publiciana* 8, no. 1 (2015): 38–52, <https://doi.org/0.36563/publiciana.v8i1.45>.

¹⁵ Anwar Sanusi, *Politik Ekologi dan Masa Depan Kebijakan Lingkungan di Indonesia*, 1 ed. (Cirebon: PT Arr rad Pratama, 2025).

¹⁶ Efriza dan Definatif Endrina Kartini Mendrofa, *MANAJEMEN KONFLIK: Tinjauan Konsep, Realitas, dan Pengelolaan Konflik*, ed. oleh F Wiwin, 1 ed. (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, bentuk konflik sumber daya alam di Teluk Singkama dapat dilihat dalam tiga bentuk yang saling berkaitan, yaitu konflik penguasaan lahan, konflik akses terhadap sumber daya alam, dan konflik yang berkaitan dengan dampak lingkungan. Konflik penguasaan lahan menjadi titik awal yang mempertemukan kepentingan masyarakat dan perusahaan, sedangkan perubahan akses terhadap sumber daya serta dampak lingkungan memperluas persoalan menjadi konflik sosial dan ekonomi. Ketimpangan akses terhadap modal, legalitas, dan kekuasaan turut memperkuat posisi yang tidak seimbang antara kedua pihak. Oleh karena itu, konflik di Teluk Singkama lebih tepat dipahami sebagai persoalan penguasaan, akses, dan kontrol terhadap sumber daya alam, bukan hanya sebagai sengketa mengenai kepemilikan lahan.

3.2 Upaya Penyelesaian Konflik dan Efektivitasnya antara Masyarakat Lokal dan Perusahaan Perkebunan Sawit di Teluk Singkama

Berdasarkan hasil wawancara, upaya penyelesaian konflik antara masyarakat lokal dan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Teluk Singkama dilakukan melalui beberapa mekanisme, terutama musyawarah, dialog, dan mediasi dengan melibatkan pemerintah desa maupun pemerintah daerah. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian konflik lebih diarahkan pada komunikasi dan perundingan agar ketegangan antara masyarakat dan perusahaan tidak berkembang menjadi konflik terbuka yang lebih luas. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Lestari dan Maryanah mengenai manajemen konflik agraria di Desa Pagar Batu yang menunjukkan bahwa penyelesaian konflik dapat berlangsung melalui beberapa pendekatan, antara lain kompetisi, kolaborasi, penghindaran, dan akomodasi.¹⁷ Penelitian tersebut menempatkan kolaborasi sebagai pendekatan yang relevan karena membuka ruang dialog antarpihak dan memungkinkan terbentuknya solusi yang dapat mendukung keberlanjutan hubungan sosial. Dalam konteks Teluk Singkama, praktik musyawarah, dialog, dan mediasi menunjukkan kecenderungan pada pendekatan kolaboratif karena melibatkan masyarakat, perusahaan, dan pemerintah dalam proses komunikasi dan pencarian solusi.

Musyawarah menjadi salah satu mekanisme utama yang digunakan untuk mempertemukan masyarakat dengan pihak perusahaan. Melalui pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi, terutama berkaitan dengan penguasaan lahan, akses terhadap sumber daya alam, dan dampak aktivitas perkebunan terhadap lingkungan. Di sisi lain, perusahaan memperoleh ruang untuk menyampaikan penjelasan mengenai kegiatan perkebunan dan kepentingannya dalam pengelolaan lahan. Proses tersebut memberikan ruang bagi kedua pihak untuk menyampaikan perspektif masing-masing dan mengurangi potensi kesalahpahaman.

Pemerintah desa memiliki peran penting dalam proses tersebut sebagai fasilitator dan mediator. Keterlibatan pemerintah memberikan ruang kelembagaan bagi masyarakat dan perusahaan untuk berkomunikasi serta mencari alternatif penyelesaian. Pemerintah juga memiliki fungsi dalam menjaga kondisi sosial agar tetap kondusif ketika terjadi ketegangan antara kedua pihak. Dalam beberapa situasi, tokoh masyarakat dan aparat keamanan turut dilibatkan untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah konflik berkembang menjadi tindakan yang lebih terbuka.

Temuan tersebut sejalan dengan Putri yang menjelaskan bahwa penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui pendekatan damai, dialog, dan mediasi untuk mencapai

¹⁷ Lestari dan Maryanah, "ANALISIS MANAJEMEN KONFLIK AGRARIA DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI DESA PAGAR BATU."

Konflik Sumber Daya Alam Antara Masyarakat Lokal dan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit: Perspektif Ekonomi dan Ekologi Politik Di Teluk Singkama Kutai Timur (Jamila, Herma Puspa Sari, Alya Rafeyfa Asyla & Siti Latifaturrahmah)

kesepakatan antara pihak-pihak yang berkonflik.¹⁸ Dalam konteks Teluk Singkama, musyawarah dan mediasi berfungsi sebagai instrumen untuk mempertemukan kepentingan yang berbeda sekaligus membuka ruang komunikasi antarpihak. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa konflik tidak diselesaikan melalui konfrontasi, tetapi melalui mekanisme yang memungkinkan adanya proses negosiasi.

Keterlibatan pemerintah juga memperlihatkan bahwa penyelesaian konflik sumber daya alam membutuhkan peran institusi yang memiliki kewenangan. Azikin menjelaskan bahwa konflik sosial dapat dikelola melalui mekanisme pengaturan sosial dan keterlibatan institusi yang memiliki otoritas.¹⁹ Dalam kasus Teluk Singkama, pemerintah berperan sebagai aktor yang memfasilitasi komunikasi dan membantu menjaga agar konflik tetap berada dalam ruang penyelesaian yang kondusif. Posisi pemerintah menjadi penting karena konflik tidak hanya berkaitan dengan hubungan sosial antara masyarakat dan perusahaan, tetapi juga berkaitan dengan pengelolaan sumber daya dan kepentingan publik.

Selain musyawarah dan mediasi, perusahaan juga melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*), antara lain dalam bentuk bantuan sosial dan perbaikan fasilitas umum di sekitar wilayah perkebunan. Kehadiran CSR dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan membantu membangun hubungan sosial yang lebih baik antara perusahaan dan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.

Namun, CSR tidak dapat secara langsung diposisikan sebagai penyelesaian terhadap akar konflik. Program sosial perusahaan lebih tepat dipahami sebagai instrumen pendukung dalam membangun hubungan sosial dan mengurangi ketegangan. Apabila persoalan utama mengenai hak atas lahan, akses terhadap sumber daya, dan kompensasi belum memperoleh penyelesaian yang diterima oleh para pihak, maka pemberian bantuan sosial belum cukup untuk menghilangkan sumber konflik. Dengan demikian, penyelesaian konflik membutuhkan pendekatan yang tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga menyentuh persoalan substantif yang menjadi sumber ketegangan.

Dari sisi efektivitas, hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme musyawarah dan mediasi cukup efektif dalam meredam ketegangan antara masyarakat dan perusahaan. Komunikasi dan perundingan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung, sementara perusahaan memperoleh kesempatan untuk menjelaskan kepentingannya. Mekanisme tersebut juga membantu menjaga agar konflik tidak berkembang menjadi tindakan kekerasan terbuka dan hubungan sosial tetap berada dalam kondisi yang relatif kondusif.

Meskipun demikian, efektivitas tersebut belum sepenuhnya menunjukkan bahwa konflik telah terselesaikan secara substantif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat persoalan yang belum terselesaikan secara menyeluruh, terutama mengenai kejelasan hak atas lahan dan bentuk kompensasi yang dianggap adil oleh masyarakat. Sebagian masyarakat masih memandang bahwa penyelesaian yang dilakukan lebih banyak memberikan solusi sementara dan belum menyentuh akar permasalahan konflik.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara pengelolaan konflik (*conflict management*) dan resolusi konflik (*conflict resolution*). Pengelolaan konflik berorientasi pada pengendalian ketegangan agar konflik tidak berkembang menjadi kekerasan atau gangguan sosial yang lebih besar, sedangkan resolusi konflik menuntut penyelesaian

¹⁸ Penny Kurnia Putri, "Manajemen konflik dan resolusi Konflik: sebuah pendekatan terhadap perdamaian," *Papua Journal of Diplomacy and International Relations* 2, no. 1 (2022): 16–34, <https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/PJDIR/article/view/1945>.

¹⁹ Andi Azikin, *Manajemen Konflik Sosial Dan Politik Kekuasaan*, ed. oleh Julia Safitri, 1 ed. (Indramayu: Penerbit Adab, 2023).

terhadap persoalan mendasar yang menjadi sumber konflik. Dalam kasus Teluk Singkama, musyawarah dan mediasi telah menunjukkan fungsi pengelolaan konflik yang cukup baik, tetapi penyelesaian terhadap persoalan substantif masih menghadapi berbagai hambatan.

Sunarso menyatakan bahwa konflik sosial dapat terus muncul apabila penyebab utama konflik belum diselesaikan secara menyeluruh.²⁰ Pandangan tersebut relevan dengan kondisi di Teluk Singkama karena perbedaan mengenai penguasaan dan pemanfaatan lahan masih menjadi persoalan penting. Selama belum terdapat kesepakatan yang dapat diterima oleh masyarakat dan perusahaan mengenai persoalan tersebut, potensi munculnya kembali ketegangan tetap ada.

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya beberapa kendala dalam proses penyelesaian konflik. Salah satunya adalah kurangnya bukti atau dokumen yang dapat memperjelas penguasaan lahan. Kondisi tersebut dapat menyulitkan proses penyelesaian karena masyarakat dan perusahaan menggunakan dasar legitimasi yang berbeda dalam mempertahankan kepentingannya. Di samping itu, perbedaan kepentingan, komunikasi yang belum selalu efektif, dan proses administrasi yang membutuhkan waktu relatif lama turut menjadi hambatan dalam mencapai penyelesaian yang lebih komprehensif.

Kendala tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian konflik sumber daya alam tidak cukup dilakukan melalui pertemuan atau mediasi secara berkala. Penyelesaian yang lebih berkelanjutan membutuhkan mekanisme yang mampu memperjelas status dan hak atas lahan, memastikan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta membangun kesepakatan mengenai akses dan pemanfaatan sumber daya secara adil. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki posisi strategis untuk memastikan bahwa proses penyelesaian tidak hanya menghasilkan kondisi yang tenang, tetapi juga mampu merespons persoalan substantif yang dirasakan oleh masyarakat dan perusahaan.

Jika dianalisis melalui perspektif ekologi politik, efektivitas penyelesaian konflik juga perlu dilihat dari sejauh mana mekanisme tersebut mampu merespons ketimpangan akses dan kekuasaan. Dialog yang dilakukan dalam kondisi posisi tawar yang tidak seimbang berpotensi menghasilkan penyelesaian yang hanya mengurangi ketegangan tanpa mengubah persoalan struktural yang menjadi dasar konflik. Oleh karena itu, penyelesaian konflik yang berkelanjutan perlu memberikan ruang yang memadai bagi masyarakat untuk menyampaikan kepentingannya dan memastikan bahwa keputusan mengenai pemanfaatan sumber daya tidak hanya mempertimbangkan kepentingan ekonomi, tetapi juga keberlanjutan sosial dan lingkungan.

Dengan demikian, efektivitas penyelesaian konflik di Teluk Singkama dapat dipahami dalam dua dimensi. Pada dimensi prosedural, musyawarah, mediasi, dan keterlibatan pemerintah cukup efektif dalam membuka komunikasi, menyalurkan aspirasi, dan meredakan ketegangan. Namun, pada dimensi substantif, penyelesaian belum sepenuhnya optimal karena persoalan hak atas lahan, kompensasi, akses terhadap sumber daya, dan ketimpangan posisi antarpihak masih memerlukan penyelesaian lebih lanjut. Temuan ini menunjukkan bahwa kondisi yang kembali kondusif belum dapat dijadikan satu-satunya indikator keberhasilan resolusi konflik.

Mekanisme penyelesaian konflik di Teluk Singkama lebih menunjukkan keberhasilan dalam mengelola konflik daripada menyelesaikan seluruh akar konflik. Musyawarah, mediasi, dan keterlibatan pemerintah mampu mencegah konflik berkembang menjadi kekerasan terbuka serta menciptakan ruang komunikasi antara masyarakat dan perusahaan. Namun, penyelesaian yang berkelanjutan memerlukan langkah lebih lanjut untuk

²⁰ Budi Sunarso, *Resolusi konflik sosial*, ed. oleh Nia Duniawati, 1 ed. (Indramayu: Penerbit Adab, 2023).

Konflik Sumber Daya Alam Antara Masyarakat Lokal dan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit: Perspektif Ekonomi dan Ekologi Politik Di Teluk Singkama Kutai Timur (Jamil, Herma Puspa Sari, Alya Rafeyfa Asyla & Siti Latifaturrahmah)

mengatasi persoalan penguasaan lahan, akses terhadap sumber daya, keadilan kompensasi, dan ketimpangan kekuasaan. Dengan demikian, penyelesaian konflik tidak cukup diarahkan pada terciptanya hubungan yang kondusif, tetapi perlu diarahkan pada terciptanya tata kelola sumber daya alam yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa konflik sumber daya alam antara masyarakat lokal dan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Teluk Singkama berakar pada perbedaan klaim dan kepentingan atas penguasaan lahan, akses terhadap sumber daya alam, serta dampak perubahan lingkungan. Dalam perspektif ekologi politik, konflik tersebut diperkuat oleh ketimpangan akses dan posisi tawar antara masyarakat dan perusahaan dalam menentukan pemanfaatan sumber daya. Penyelesaian melalui musyawarah, dialog, mediasi, dan keterlibatan pemerintah relatif efektif dalam meredam ketegangan dan mencegah konflik berkembang menjadi kekerasan terbuka, tetapi belum sepenuhnya mampu menyelesaikan persoalan substantif, terutama kejelasan hak atas lahan, kompensasi, dan keadilan akses terhadap sumber daya. Dengan demikian, penyelesaian konflik di Teluk Singkama lebih menunjukkan keberhasilan pada aspek *conflict management* daripada *conflict resolution*, sehingga diperlukan tata kelola sumber daya yang lebih partisipatif, transparan, dan berkeadilan agar penyelesaian tidak berhenti pada terciptanya kondisi yang kondusif, tetapi juga mampu mengatasi akar konflik secara berkelanjutan.

REFERENCES

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Diedit oleh Patta Rapanna. 1 ed. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Azikin, Andi. *Manajemen Konflik Sosial Dan Politik Kekuasaan*. Diedit oleh Julia Safitri. 1 ed. Indramayu: Penerbit Adab, 2023.
- Efriza, dan Definitif Endrina Kartini Mendrofa. *MANAJEMEN KONFLIK: Tinjauan Konsep, Realitas, dan Pengelolaan Konflik*. Diedit oleh F Wiwin. 1 ed. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2024.
- Hafsari, Tria Anggita. "Di balik konflik sawit yang tak kunjung usai: Hak, kuasa, dan kehidupan masyarakat lokal." *Masyarakat Indonesia* 50, no. 2 (2024): 335–44. <https://doi.org/10.55981/jmi.2024.8897>.
- Hasanah, Dinda Uswatun, dan Asih Mulyaningsih. "Persepsi Masyarakat Terhadap Dampak Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit: Tinjauan Literatur Tentang Aspek Ekonomi, Sosial, Dan Lingkungan." *Jurnal Ilmu Pertanian Tirtayasa* 8, no. 1 (2026): 25–38. <https://doi.org/10.33512/jipt.v8i1.40114>.
- Lestari, Suci Indah, dan Tabah Maryanah. "ANALISIS MANAJEMEN KONFLIK AGRARIA DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI DESA PAGAR BATU." *Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK)* 4 (2025): 1296–1306. <https://doi.org/10.36441/snpk.vol4.2025.462>.
- Miles, M B, A M Huberman, dan J Saldana. *Qualitative Data Analysis*. Arizona: SAGE Publications, 2014. <https://books.google.co.id/books?id=3CNrUbTu6CsC>.
- Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Diedit oleh Meyniar Albina. 1 ed. Bandung: CV. Harfa Creative, 2023. <http://repository.uinsu.ac.id/19091/1/buku-metode-penelitian-kualitatif.Abdul-Fattah.pdf>.
- Putra, Hendra Triawan Sudaryo, Muhammad Ramli AT, dan Ridwan Syam. "Dinamika Konflik Agraria dan Ketimpangan Tata Kelola: Studi Kasus Sengketa Lahan di Desa Batu Mila." *Journal of Peace, Security and Democracy* 1, no. 2 (2025): 49–73. <https://doi.org/10.63280/jpsd.v1i2.45967>.

- Putri, Penny Kurnia. "Manajemen konflik dan resolusi Konflik: sebuah pendekatan terhadap perdamaian." *Papua Journal of Diplomacy and International Relations* 2, no. 1 (2022): 16–34. <https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/PJDIR/article/view/1945>.
- Ramadhan, Ayuda. "Konflik Agraria Analisis Resolusi Konflik Agraria dan Sumber Daya Alam di Aceh." *Jurnal Transformasi Administrasi* 13, no. 01 (2023): 1–17. <https://doi.org/10.56196/jta.v13i01.247>.
- Sanusi, Anwar. *Politik Ekologi dan Masa Depan Kebijakan Lingkungan di Indonesia*. 1 ed. Cirebon: PT Arr rad Pratama, 2025.
- Sinambela, Amsal, Marini Wardhana, Mega Mariska, dan Resha Moniyana Putri. "Perluasan Lahan Sawit Di Papua Untuk Swesembada Energi: Tinjauan Kritis Atas Daya Dukung Lingkungan Dan Konflik Agraria." *E-journal Field of Economics, Business and Entrepreneurship (EFEBE)* 4, no. 2 (2026): 823–35. <https://doi.org/10.23960/efebe.v4i2.348>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sunarso, Budi. *Resolusi konflik sosial*. Diedit oleh Nia Duniawati. 1 ed. Indramayu: Penerbit Adab, 2023.
- Wahyudi, Andri. "Konflik, konsep teori dan permasalahan." *Publiciana* 8, no. 1 (2015): 38–52. <https://doi.org/0.36563/publiciana.v8i1.45>.
- White, Benjamin. "Dibalik pertarungan sumber daya Indonesia: ekologi politik dan penerapannya pada studi dan perjuangan lingkungan hidup." *Tanah Air*, no. Oktober-Desember (2009): 3–9. https://repub.eur.nl/pub/18311/white_tanah_air_octdec09.pdf.
- Yuliani, Febri. "Implementasi kebijakan penguatan kelembagaan perkebunan sawit rakyat pada lahan gambut." *Jurnal Kebijakan Publik* 10, no. 1 (2019): 33–40. <https://doi.org/10.31258/jkp.v10i1.7428>.